



Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju

Muchtar¹, Junaeda²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Mamuju.

¹Email: muchtarbaso@yahoo.co.id

²Email : edha.doraemon92@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2016–2018. Data penelitian terdiri dari data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa laporan keuangan daerah. Analisis menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan rata-rata sebesar 7,16% yang berarti masih sangat rendah dan bersifat instruktif, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi. Rasio efektivitas PAD berada pada kisaran 89,50%–100%, menunjukkan efektivitas yang berfluktuasi. Rasio efisiensi rata-rata sebesar 5,30% yang berarti efisien. Rasio pertumbuhan PAD mengalami tren menurun dari 13,56% (2016) menjadi 1,91% (2018). Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Mamuju relatif belum optimal, khususnya dalam peningkatan kemandirian daerah.

Kata Kunci : kinerja keuangan, rasio keuangan, PAD, APBD, pemerintah daerah

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of the Regional Government of Mamuju Regency using the independence ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, and growth ratio based on the Budget Realization Report (LRA) for the years 2016–2018. The research data consist of primary data obtained through interviews and secondary data in the form of regional financial reports. The analysis shows that the average financial independence ratio is 7.16%, which indicates a very low and instructive level, meaning that dependence on the central government remains high. The PAD effectiveness ratio ranges from 89.50% to 100%, showing fluctuating effectiveness. The average efficiency ratio is 5.30%, which indicates efficiency. The PAD growth ratio shows a declining trend from 13.56% (2016) to 1.91% (2018). The results of the study indicate that the financial performance of Mamuju Regency has not been relatively optimal, particularly in improving regional independence.

Keywords: financial performance, financial ratios, PAD, APBD, regional government

PENDAHULUAN

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola keuangannya secara mandiri, efisien, dan efektif. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak hanya sekadar menunjukkan bagaimana dana publik dibelanjakan, tetapi juga mencakup sejauh mana dana tersebut digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk mampu meningkatkan kemandirian keuangan. Kemandirian keuangan berarti berkurangnya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi, sehingga daerah dapat membiayai pembangunan dengan mengoptimalkan potensi lokal. Namun, dalam praktiknya banyak daerah, termasuk Kabupaten Mamuju, masih menghadapi tantangan rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah.

Pengukuran kinerja keuangan daerah menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah berhasil mengelola keuangannya. Analisis rasio keuangan, seperti rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan, dapat memberikan gambaran objektif mengenai kondisi keuangan daerah. Dengan analisis tersebut, pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan sekaligus merumuskan strategi peningkatan pendapatan dan pengelolaan anggaran pada periode berikutnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dengan menggunakan empat rasio utama, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan, pada periode tahun 2016–2018.

KAJIAN TEORI

Manajemen Keuangan

Tugas manajer keuangan tidak hanya mencatat, membuat laporan, mengendalikan posisi kas, membayar tagihan – tagihan dan mencari dana. Akan tetapi manajer keuangan juga harus mampu menginvestasikan dana, mengatur kombinasi sumber dana yang optimal, serta pendistribusian keuntungan (pembagian deviden) dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan. Penginvestasian dana merupakan tolak ukur besar kecilnya suatu perusahaan, baik dilihat dari aspek laba, risiko usaha, maupun likuiditasnya. Pengaturan kombinasi sumber dana (hutang dan modal sendiri) berikut kebijakan dividen merupakan penentu besar kecilnya beban finansial dan risiko finansial. Semua variabel tersebut akan mempengaruhi penilaian perusahaan secara keseluruhan.

Setiap perusahaan selalu membutuhkan dana dalam rangka memenuhi kebutuhan operasi sehari – hari maupun untuk menembangkan perusahaan. Kebutuhan dana tersebut berupa modal kerja maupun untuk mengembangkan perusahaan. Kebutuhan dana tersebut berupa modal kerja maupun untuk pembelian aktiva tetap. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, perusahaan harus mampu mencari sumber dana dengan komposisi yang menghasilkan beban biaya paling murah. Kedua hal tersebut harus bisa diupayakan oleh manajer keuangan.

Bagi perusahaan, masalah yang sama juga dihadapi. Perusahaan memerlukan sebagai kekayaan (mesin, gedung, kendaraan bermotor, persediaan bahan baku dan sebagainya) untuk menjalankan operasinya. Untuk itu perusahaan perlu mencari sumber dana untuk membiayai kebutuhan untuk operasi tersebut. Dalam suatu organisasi, pengaturan kegiatan keuangan sering disebut sebagai manajemen keuangan. Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti (2006:3)

Pengukuran Kinerja

Bastian (2006:274) memaparkan pengertian kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan penskema strategi (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Akutansi Pemerintah Daerah

Akutansi pemerintahan merupakan salah bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana – dana masyarakat

yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. (Nordriawan dkk, 2007:1)

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Keuangan daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan kemasyarakatan di daerah. Oleh karena itu, keuangan daerah diupayakan untuk berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Kinerja adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan.

Laporan keuangan Sektor Publik

Bastian (2006:247) menyebutkan bahwa laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi – transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai (wide range user) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, baik dari instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju maupun pihak lain yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi yang relevan. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, sedangkan data sekunder diperoleh dari pihak atau dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian, antara lain Laporan Realisasi Anggaran tahun 2016–2018.

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan pada lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran nyata mengenai objek yang diteliti. Wawancara dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber yang berkompeten guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari catatan, arsip, serta laporan tertulis yang berkaitan erat dengan penelitian, khususnya dokumen keuangan dan laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju.

Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama. Pertama, peneliti mengumpulkan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju yang difokuskan pada pengukuran kinerja keuangan daerah. Kedua, data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan rasio keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2016–2018. Rasio yang digunakan meliputi:

1. Rasio Kemandirian

Rasio ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Rumusnya adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{(\text{Bantuan Pusat} + \text{Pinjaman})} \times 100\%$$

2. Rasio Efektivitas

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan PAD. Rumusnya adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio Efisiensi

Rasio ini digunakan untuk menilai perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Rumusnya adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan PAD dari satu periode ke periode berikutnya. Rumusnya adalah:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD}_{t1} - \text{PAD}_{t0}}{\text{PAD}_{t0}} \times 100\%$$

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan setelah seluruh data dianalisis, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju selama periode penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju berdasarkan data Realisasi APBD tahun 2016 – 2018 dengan melihat rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efesiensi dan rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Mamuju tahun 2016 – 2018

Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016 – 2018 ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

**Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Mamuju
Tahun Anggaran 2016 – 2018**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Bantuan Pusat Pinjaman		Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
		Total Pendapatan Transfer	Lain – lain Pendapatan Yang Sah		
2016	66.800.589.252,87	989.895.687.316,73	1.636.646.652,00	6,74%	Instruktif
2017	74.023.409.603,06	969.429.846.295,08	43.980.851.624,00	7,30%	Instruktif
2018	75.433.707.053,44	973.204.789.242,93	41.680.873.724,00	7,43%	Instruktif

Sumber: Data BPKAD Kabupaten Mamuju

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

$$2016 = \frac{66.800.589.252,87}{989.895.687.316,73 + 1.636.646.652,00} \times 100\%$$

$$2016 = \frac{66.800.589.252,87}{991.532.333.968,73} \times 100\%$$

$$2016 = 0,07 \times 100\%$$

$$2016 = 6,74\% \text{ dst}$$

Dilihat dari data yang diolah, berdasarkan tahun 2016 hasil Rasio Kemandirian menunjukkan 6,74% artinya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah untuk membayar pajak dan retribusi daerah tergolong sangat rendah sekali. Pada tahun 2017 hasil Rasio Kemandirian menunjukkan 7,30% artinya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah untuk membayar pajak dan retribusi daerah juga tergolong sangat rendah sekali, tetapi dari tahun 2016 hingga 2017 tingkat kemandirian keuangan kota Mamuju meningkat sebesar 0,57%. Pada Tahun 2018 Rasio Kemandirian menunjukkan hingga 7,43% artinya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah untuk membayar pajak dan retribusi daerah tergolong sangat rendah sekali, dan pada tahun 2017 hingga tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,13% artinya partisipasi masyarakat untuk membangun daerahnya

Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju

kurang efektif karena dilihat dari pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah pada tahun 2016 – 2018 rendah sekali dan bersifat instruktif, tingkat kemandirian masih dibawah 25%.

Pola hubungan instruktif artinya sangat rendah sekali, peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada Kemandirian Pemerintah Daerah. Sumber keuangan yang dominan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju masih berasal dari Pemerintah Pusat. Rasio Kemandirian keuangan dilihat dari 3 (tiga) tahun terakhir memiliki rata – rata sebesar 7,16% tergolong sangat rendah sekali dan masih dibawah rata – rata rasio kemandirian.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa bantuan Pemerintah masih memberikan kontribusi yang sangat besar. Bagi keuangan Pemda Kabupaten Mamuju. Bahkan dari tahun 2016 – 2018 rata – rata penerimaan bantuan dari pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi hampir mencapai angka 100%. Baik itu dilihat dari segi jumlah ataupun dari segi persentase Pendapatan Bantuan Pemerintah Pemda Kabupaten Mamuju. Artinya semakin jelas terlihat bahwa masih besarnya bantuan dari pemerintah pusat ataupun provinsi didalam struktur penerimaan Pemerintah Daerah Mamuju. Tetapi partisipasi masyarakat kabupaten Mamuju untuk pembangunan Daerahnya masih kurang baik untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

2. Rasio Efektivitas Tahun 2016 – 2018

Hasil perhitungan rasio efektivitas perolehan PAD Mamuju yaitu sebagai berikut:

Perhitungan Rasio Efektifitas PAD Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2016 – 2017

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Pagu Anggaran PAD	Rasio Efektivitas
2016	66.800.589.252,87	74.634.661.800,00	89,50%
2017	74.023.409.603,06	74.023.409.603,06	100,00%
2018	75.433.707.053,44	80.353.572.874,00	93,88%

Sumber: Data BPKAD Kabupaten Mamuju

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$2016 = \frac{66.800.589.252,87}{74.634.661.800,00} \times 100\%$$

$$2016 = 0,90 \times 100\%$$

$$2016 = 89,50\% \text{ dst}$$

Dilihat dari data yang telah diolah, berdasarkan tingkat keefektifan PAD Kabupaten Mamuju pada tahun 2016 rasio efektifitas menunjukkan 89,50% artinya kemampuan pemda Kabupaten Mamuju dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan riil daerah kurang efektif karena persentase rasio efektifitas kurang dari seratus persen dan menggambarkan kemampuan pemda Kabupaten Mamuju kurang baik, tetapi dari tahun 2016 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 10,50%. Pada tahun 2017 rasio efektifitas menunjukkan 100,00% artinya kemampuan pemda Kabupaten Mamuju dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan riil daerah dikatakan efektif berimbang karena persentase rasio efektifitas sama dengan seratus persen dan menggambarkan kemampuan pemda Kabupaten Mamuju baik, tetapi tahun 2017 hingga tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 6,12%.

Pada tahun 2018 rasio efektifitas menunjukkan 93,88% artinya kemampuan pemda Kabupaten Mamuju dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan riil daerah kurang efektif karena persentase rasio efektifitas kurang dari seratus persen dan menggambarkan kemampuan pemda Kabupaten Mamuju kurang baik. Namun pada tahun 2016 dan 2018 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2017 seluruh penerimaan Pendapatan Asli Daerah telah mencapai target dengan persentase rasio efektifitas sama dengan seratus persen dan dikatakan efektif berimbang.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Kabupaten Mamuju tahun 2016 – 2018

Biaya pemungutan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2010 pada Pasal 5 besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 3% untuk Provinsi dan 5% untuk Kabupaten/Kota, tetapi untuk Pemda Kabupaten Mamuju besarnya insentif yaitu sebesar 5%. Hasil perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016 – 2018 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Kabupaten Mamuju
Tahun Anggaran 2016 – 2018**

Tahun	Biaya Pemungutan PAD (5%) Pagu Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efisiensi
2016	3.731.733.090,00	66.800.589.252,87	5,59%
2017	3.701.170.480,15	74.023.409.603,06	5,00%
2018	4.017.678.643,70	75.433.707.053,44	5,33%

Sumber: Data BPKAD Kabupaten Mamuju

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Cara mencari biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD yaitu Pagu Anggaran x biaya pemungutan PAD

2016 = Pagu Anggaran x biaya pemungutan PAD

2016 = 74.634.661.800,00 x 5%

2016 = 3.731.733.090,00

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$2016 = \frac{3.731.733.090,00}{66.800.589.252,87} \times 100\%$$

2016 = 0,06 x 100%

2016 = 5,59% dst

Dari hasil perhitungan yang telah diolah, dapat dilihat bahwa Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Mamuju pada tahun 2016 menunjukkan 5,59% artinya rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100% dan menggambarkan kemampuan Daerah Kabupaten Mamuju pada tahun 2016 dikatakan efisien. Pada tahun 2017 rasio efisiensi menunjukkan sebesar 5,00% artinya semakin kecil rasio yang diperoleh maka tingkat kemampuan daerah semakin baik. Sedangkan tahun 2018 rasio efisiensi menunjukkan persentase sebesar 5,33% artinya kemampuan daerah Kabupaten Mamuju dikatakan baik karena rasio dicapai dibawah 100%.

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pada tahun 2016 – 2018 rasio efisiensi menunjukkan persentase semakin rendah dan rata – rata dari rasio efisiensi menunjukkan persentase sebesar 5,30%. Semakin rendah rasio efisiensi dan persentase yang dicapai kurang dari 100% maka kemampuan daerah bisa dikatakan efisien atau semakin membaik untuk pertumbuhan pemda Kabupaten Mamuju.

4. Rasio Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016 – 2018

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju tahun 2016 – 2018 ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

**Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Mamuju
Tahun Anggaran 2016 – 2018**

Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju

Tahun	PADt0	PADt1	Rasio Pertumbuhan
2015-2016	58.825.603.892,07	66.800.589.252,87	13,56%
2016-2017	66.800.589.252,87	74.023.409.603,06	10,81%
2017-2018	74.023.409.603,06	75.433.707.053,44	1,91%

Sumber: Data BPKAD Kabupaten Mamuju

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{PADt1 - PADt0}{PADt0} \times 100 \%$$

$$2016 = \frac{66.800.589.252,87 - 58.825.603.892,07}{58.825.603.892,07} \times 100 \%$$

$$2016 = \frac{7.974.985.360,80}{58.825.603.892,07} \times 100 \%$$

$$2016 = 0,14 \times 100\%$$

$$2016 = 13,56\% \text{ dst}$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah diolah, kondisi pertumbuhan APBD Kabupaten Mamuju bersifat fluktuatif. Kondisi pertumbuhan perolehan PAD dan pertumbuhan pendapatan daerah selalu meningkat tapi peningkatannya masih bersifat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan rasio pertumbuhan PAD tahun 2016 mencapai 13,56% tetapi pada tahun 2017 rasio peningkatan PAD hanya sebesar 10,81% dan pada tahun 2018 rasio peningkatan PAD hanya sebesar 1,91%.

Tahun 2016 dan 2017 rasio pertumbuhan menggambarkan persentase pertumbuhan dari komponen pendapatan dan pengeluaran semakin besar kemampuan pemda Kabupaten Mamuju dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai. Sedangkan tahun 2018 tidak dapat dipertahankan karena persentase pertumbuhan dari komponen pendapatan dan pengeluaran semakin kecil kemampuan pemda Kabupaten Mamuju dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai tidak bisa dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pertumbuhan PAD yang dialokasikan untuk sarana dan prasarana publik tidak dapat dipertahankan peningkatannya dan cenderung mengalami penurunan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka penulis akan menyimpulkan yaitu Kemampuan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju pada tahun 2016 – 2018 dilihat dari Rasio Kemandirian bersifat instruktif artinya sangat rendah sekali. 2016 dan 2018 dilihat dari rasio efektifitas kurang efektif karena rasio efektifitas kurang dari 100% sedangkan 2017 telah mencapai target dengan persentase rasio efektifitas sama dengan 100% dan dikatakan efektif berimbang. 2016 – 2018 dilihat dari rasio efisiensi maka kemampuan daerah dikatakan efisien atau semakin baik untuk pertumbuhan daerah Kabupaten Mamuju. Sedangkan kemampuan kinerja keuangan dilihat dari rasio pertumbuhan yaitu PAD Kabupaten Mamuju yang dialokasikan untuk sarana dan prasarana publik tidak dapat dipertahankan karena cenderung mengalami penurunan.

Saran

Berdasarkan hasil analisis, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Mamuju mengurangi ketergantungan pada dana pusat dengan memaksimalkan potensi pendapatan daerah, misalnya melalui pengelolaan objek wisata, optimalisasi aset daerah, serta peningkatan retribusi jasa umum. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan penggunaan rasio keuangan yang lebih beragam, periode penelitian yang lebih panjang, serta cakupan wilayah yang lebih luas agar hasilnya lebih komprehensif dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra, 2006, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Jakarta, Erlangga

Husnan S dan E Pudjiastuti., 2006, Dasar – Dasar Manajemen Keuangan, edisi 5, UPP STIM YKPN, Yogyakarta

Nordiawan, Deddi, dkk, 2007, Akuntansi Pemerintahan, Jakarta. Salemba Empat